



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MALANG TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
BINJAI TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024
- Pemohon: Satika Simamora, Sarlandi Hutabarat

PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kabupaten Malang Tahun 2024
- Pemohon: Gunawan Hs, Umar Usman

PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Binjai Tahun 2024
- Pemohon: Donal Anjar Simanjuntak, Muhammad Andri

PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Baqir Aminatullah, Taufadi

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 8 Januari 2025, Pukul 19.01 – 20.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra
Abdul Basid Fuadi

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 114/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Roy Jansen Siagian
2. Ranto Sibarani

B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dwi Indrotito Cahyono

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Dedi Hermawansyahputra
2. Edi Perwira Ginting

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII:

1. Gugum Ridho Putra
2. Abdul Kholis

E. Termohon:

1. Symtoy (KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
2. Aksari (KPU Kabupaten Malang)
3. Anton Indratno (KPU Kota Binjai)
4. Arifin Saleh (KPU Kota Binjai)
5. Mahdi (KPU Kabupaten Pamekasan)

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Arya Bimantara
2. Jufaldi
3. James Simanjuntak

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 114/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jimy Yansen

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 138/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bakti Riza Hidayat
2. Moch. Asni Fitriani

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 167/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Kamaluddin Pane
2. Denny Alan Pakiding

I. Pihak Terkait Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. KH. Kholillurrahman

J. Kuasa Hukum Pihak Terkair Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Sri Sugeng Pujiatmiko

K. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Romi Sitompul | (Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara) |
| 2. Kopman Pasaribu | (Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara) |
| 3. M. Wahyudi | (Bawaslu Kabupaten Malang) |
| 4. Abdul Allam Amrullah | (Bawaslu Kabupaten Malang) |
| 5. Fadhil Azhar | (Bawaslu Kabupaten Binjai) |
| 6. Julkifli | (Bawaslu Kabupaten Binjai) |
| 7. Fauzan Adima | (Bawaslu Kabupaten Pamekasan) |
| 8. Suryadi | (Bawaslu Kabupaten Pamekasan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.01 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara 114, 138, 167, 183 PHPU Bupati atau Wali Kota Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat malam ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Pertama sekali kami mohon maaf karena jadwal kita yang seharusnya tadi siang, terpaksa digeser menjadi setelah magrib. Nah, ini bukan sesuatu yang kami rencanakan, tapi karena salah seorang Hakim MK itu tiba-tiba ... apa ... dirawat di rumah sakit, sehingga harus digilir panelnya karena panel itu tetap harus 3 orang Hakim Konstitusi. Nah, kebetulan malam hari ini dapat giliran Panel 2 untuk malam, jadi nanti pukul 7 ini sampai selesai dan itu berakibat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada dalam ruangan ini juga harus mengikuti jadwal itu. Mudah-mudahan, Yang Mulia Bapak Anwar Usman, Senin sudah bisa lebih baik dan bisa hadir di persidangan sehingga tidak ada lagi jadwal malam hari. Itu permakluman, jadi mohon maaf untuk kita semua atas kejadian ini.

Dan sebelum dimulai, silakan untuk Pemohon, Kuasa Pemohon 144 memperkenalkan diri, 114, mohon maaf.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [1:53]

Baik, Terima kasih Yang Mulia.

Di sini kami Kuasa Hukum Pemohon dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan, di sini dengan saya Roy Jansen Siagian, didampingi oleh teman saya.

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [2:06]

Izin, Yang Mulia. Saya Ranto Sibarani, Terima kasih.

4. KETUA: SALDI ISRA [2:10]

Terima kasih.

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [2:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

6. KETUA: SALDI ISRA [2:13]

Kuasa untuk 138 Kabupaten Malang.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [2:23]

Oh ini, perkenalkan nama saya Dewi Indrotito Cahyono, S.H., M.M., dari Kantor Hukum Justitia Indonesia dari Malang, Kuasa dari H. Gunawan sama Dr. Umar.

8. KETUA: SALDI ISRA [2:36]

Oke, Terima kasih.
Pemohon 167 atau Kuasanya. Online, ya. Silakan.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [2:47]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat Malam.
Perkenalkan, saya Kuasa Hukum Harkarando Siregar, S.H., kita berkantor di Kantor Hukum Harkarando Siregar, S.H & Rekan. Begitu juga dengan rekan saya di sebelah kiri saya yang bernama Edi Perwira Ginting, dan di sebelah paling ujung, nama Dedi Hermawansyahputra.

10. KETUA: SALDI ISRA [3:11]

Oke.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [3:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: SALDI ISRA [3:12]

Terima kasih.
Suara dari sini bisa ditangkap dengan baik, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [3:19]

Bisa, Yang Mulia.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO/2025: HARKARANDO SIREGAR [3:18]

Bisa, Yang Mulia, di tangkap jelas.

15. KETUA: SALDI ISRA [3:19]

Oke, terima kasih.

Kuasa untuk permohonan atau Pemohon 183, Pamekasan, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [3:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb.

Hadir Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi dari Kantor Hukum Erfandi & Partner. Saya sendiri, Gugum Ridho Putra, dan rekan kami Bapak Abdul Kholis.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [3:47]

Terima kasih.

Termohon untuk Perkara 114, silakan.

18. TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [3:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon KPU (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [3:59]

Pake mik itu.

20. TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK KUASA [04:02]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Termohon Perkara 114, Kabupaten Tapanuli Utara (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [04:10]

Ya.

22. TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK KUASA [04:11]

Yang jadi Kuasa hadir adalah Pak James ... saya James Simanjuntak, Prinsipal Symtoy Manulang.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:12]

Dari KPU, ya?

24. TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK KUASA [04:13]

Ya.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:15]

Terima kasih.
Perkara 138?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [04:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Arya Bimantara dari AB [Sic!] Law Firm. Di persidangan ini selaku Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Malang yang hari ini dihadiri oleh Komisaris Pak Aksari.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:43]

Oke, terima kasih.
Termohon untuk Perkara 167?

28. TERMOHON: ARIFIN SALEH [04:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:48]

Walaikumsalam wr. wb.

30. TERMOHON: ANTON INDRATNO [04:49]

Kami Termohon dari KPU Kota Binjai, saya Ketua KPU Kota Binjai, Anton Indratno dan Kordiv Hukum saya, Pak Arifin Saleh, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

Oke, langsung, ya? Tidak pakai Kuasa Hukum, ya?

32. TERMOHON: ARIFIN SALEH [05:04]

Pakai, tapi masih dalam proses, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Oke. Nih, ini pengaruh awal tahun, lama sekali itu apanya ... sinyalnya dari KPU RI nya.

Untuk Termohon 183?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [05:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Walaikumsalam wr. wb.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [05:27]

Kami dari Termohon Perkara Nomor 183, dalam hal ini KPU Kabupaten Pamekasan, yang dalam hal ini diberikan kuasa kepada kami, Law Office Saleh and Partners, diwakili oleh saya sendiri, Jufaldi, S.H., yang dalam hal ini juga hadir prinsipal kami, Yang Mulia, atas nama Mahdi selaku Ketua KPU Kabupaten Pamekasan. Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:48]

Terima kasih.

Pihak Terkait untuk Perkara 114, silakan.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP/XXIII/2025: TAMA SATRYA LANGKUN [05:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Walaikumsalam wr. wb.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP/XXIII/2025: TAMA SATRYA LANGKUN [06:00]

Saya dari Kantor Hukum JNP Law Office, Tama Satrya Langkun, bersama dengan rekan saya Jimy Yansen, mewakili Kuasa Hukum kami ... mewakili dari Prinsipal kami, Jonius Taripar Hutabarat dan Deni Parlindungan. Terima kasih (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [06:12]

Terima kasih.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP/XXIII/2025: TAMA SATRYA LANGKUN [06:12]

Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Walaikumsalam wr. wb.
Kuasa Pihak Terkait dari Perkara 138.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP/XXIII/2025: BAKTI RIZA HIDAYAT [06:25]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Kami selaku sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia, melaporkan bahwa kami dari Kuasa Hukum H. Sanusi dan Bu Hj. Lathifah, izinkan kami bagi Bakti Riza Hidayat dan Moch. Asni Fitriani untuk mewakili beliau di persidangan Yang Mulia ini.
Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:45]

Terima kasih.
Pihak Terkait untuk 167?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO/XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [06:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kantor Hukum Kamal Pane, S.H., M.H., dalam hal ini mewakili dari Prinsipal Bapak Amir Hamzah dan Bapak Jihadi, Wali ... Calon Wali Kota Binjai Nomor Urut 4.

47. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

Oke, terima kasih.

Terakhir, Pihak Terkait untuk Perkara 183.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP/XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [07:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: SALDI ISRA [07:12]

Walaikumsalam wr. wb.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP/XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [07:15]

Kami dari Pihak Terkait Perkara 183, yang hadir pada malam hari ini prinsipal langsung, K.H. Kholillurrahman dan saya sendiri Kuasa Hukum Sri Sugeng Pujiatmiko.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SALDI ISRA [07:34]

Walaikumsalam wr. wb.

Bawaslu, disilakan.

52. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [07:36]

Terima kasih, Yang Mula.

Totok Hariyono, Bawaslu RI, mendampingi Fadhil Azhar dari Binjai, Julkifli, Binjai (Sumut), Muhammad Wahyudi (Ketua Bawaslu Kabupaten Malang), Abdul Allam Amrullah (Kabupaten Malang), Kopman Pasaribu (Bawaslu Tapanuli Utara), Romy Sintompul (Tapanuli Utara), Fauzan Adima (Kabupaten Pamekasan), dan Suryadi (Pamekasan). Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [08:04]

Terima kasih, Pak Totok, yang setia dari pagi mendampingi tim.

Agenda persidangan kita malam hari ini adalah Pendahuluan untuk mendengarkan Permohonan, Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon yang nanti akan kita beri waktu maksimal masing-masing permohonan adalah 15 menit menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Jadi enggak usah dibacakan, yang penting-pentingnya saja karena kami semua sudah membaca permohonan, ini bahkan sudah melakukan gelar perkara. Itu pertama.

Yang kedua, diberitahukan bahwa apa yang sudah disampaikan dalam perbaikan permohonan tidak ada lagi perbaikan. Jadi waktu untuk perbaikan sudah diberikan, jadi tidak ada lagi perbaikan.

Yang ketiga, kalau menyampaikan permohonan secara lisan, itu menyampaikan apa yang ditulis dalam permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Yang keempat, kalau ada yang mau menyampaikan bukti, baik menambahkan bukti maupun bukti baru, bisa disampaikan. Kalau disampaikan dalam persidangan sekarang, kalau masih memungkinkan akan diverifikasi dan disahkan. Kalau tidak, di sidang berikutnya. Jadi Pemohon, Termohon, pihak terkait dan Bawaslu dipersilakan, dan nanti kalau sudah selesai diverifikasi, akan disahkan. Itu kira-kira yang perlu diberi catatan.

Ada yang mau menyampaikan dari Kabupaten Malang? Ada, silakan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [08:56]

Dalam persidangan ini.

55. KETUA: SALDI ISRA [08:58]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [08:59]

Pada intinya, saya sebagai Kuasa Hukum baru, Yang Mulia, karena ada pencabutan Kuasa Hukum yang pertama. Dan dalam sidang ini kami ingin menyampaikan pencabutan, permohonan kami, yang akan kami ajukan sekalian. Kami ajukan juga Kuasa kami dalam persidangan ini, mohon izin.

57. KETUA: SALDI ISRA [09:25]

Jadi dulu ketika mengajukan permohonan, kuasanya beda ya dengan Bapak, Ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [09:29]

Beda, beda.

59. KETUA: SALDI ISRA [09:30]

Bukti pencabutannya sudah, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [09:32]

Sudah, ada (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [09:36]

Pencabutan ... apa ... kuasa yang pertama? (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [09:38]

Sudah kami serahkan, tadi secara administrasi sudah kami serahkan, dalam persidangan kami siap menyerahkan juga.

63. KETUA: SALDI ISRA [09:46]

Oke, ini sudah, fotokopinya sudah kami sampaikan, sudah disampaikan ke kami.

Berarti yang mencabut ini Kuasa Hukum atas nama Pak (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [09:56]

H. Gunawan.

65. KETUA: SALDI ISRA [09:57]

H. Gunawan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [09:57]

Sama Dr. Umar sebagai Pemohon.

67. KETUA: SALDI ISRA [010:00]

Oh, ini prinsipal, ya? Bukan (...)

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [09:03]

Ya, prinsipalnya itu, saya Kuasa Hukumnya.

69. KETUA: SALDI ISRA [10:06]

Oke.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [10:07]

Mohon izin, Yang Mulia, kami sampaikan.

71. KETUA: SALDI ISRA [10:08]

Oke. Saya bisa bagaimana ... apa ... mengkonfirmasi kepada prinsipal ini?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [10:09]

Boleh, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [10:10]

Bagaimana caranya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [10:11]

Di telepon juga bisa.

75. KETUA: SALDI ISRA [10:12]

Bapak kalau bisa, kasih nomor teleponnya ke ... apa ke (...)

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [10:13]

Oh, ya.

77. KETUA: SALDI ISRA [10:15]

Nanti kita akan coba cek, ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [10:18]

Boleh, sekarang atau?

79. KETUA: SALDI ISRA [10:33]

Ya nanti Bapak kasih saja nomornya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [10:34]

Oke, siap.

81. KETUA: SALDI ISRA [10:35]

Tolong diambil nomor teleponnya, biar dicek.

Jadi, kami ini harus hati-hati yang soal-soal seperti ini karena ada 1, 2 kejadian penarikan ... apa ... pergantian Kuasa Hukum, tiba-tiba Kuasa Hukum menarik apa yang baru menarik permohonan, lalu kemudian kuasa ... apa ... yang prinsipal komplain bahwa dia tidak Permohonan itu. Nah, itu jadi ini harus kami pastikan dulu, ya. Nanti akan dikabari. Jadi Bapak tenang saja duduk dalam ruangan ini, ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [12:12]

Siap.

83. KETUA: SALDI ISRA [12:13]

Ya, supaya bisa dikonfirmasi, tentu saya tidak mungkin konfirmasi kepada Pihak Terkait karena posisinya beda kan, kecuali Anda sudah komunikasi, enggak?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAKTI RIZA HIDAYAT [12:25]

Izin, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [12:25]

Ya.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAKTI RIZA HIDAYAT [12:26]

Kami belum ada komunikasi dengan Pihak Pemohon, tapi izinkan kami menyampaikan bahwa kami mendapatkan tembusan (...)

87. KETUA: SALDI ISRA [12:34]

Oke.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAKTI RIZA HIDAYAT [12:35]

Dari Pemohon dan prinsipal terkait satu soal dokumen pencabutan Surat Kuasa dan pencabutan Permohonan Register Perkara atas nama dari Haji Gunawan dan Dr. Umar Usman. Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan sebagai Pihak Terkait. Terima kasih.

89. KETUA: SALDI ISRA [12:55]

Oke.

Yang kedua Surat Kuasa baru Bapak ada, enggak?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [12:59]

Siap.

91. KETUA: SALDI ISRA [13:01]

Coba serahkan, Pak.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [13:02]

Ya.

93. KETUA: SALDI ISRA [13:04]

Tolong diambil.
Yang hadir siapa namanya, Pak?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [13:45]

Dwi Indrotito Cahyono.

95. KETUA: SALDI ISRA [13:47]

Dwi Indrotito Cahyono?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYONO [13:48]

Ya.

97. KETUA: SALDI ISRA [13:49]

Ya. Ini sudah ada ya, penarikan kuasa, Surat Kuasa Khusus dan itu pergantian dari kuasa sebelumnya. Tapi izinkan kami mengkonfirmasi terlebih dahulu, ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYON [14.05]

Siap, siap.

99. KETUA: SALDI ISRA [14.07]

Jadi apa ... Pak Dwi silakan tetap ada dalam ruangan ini.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: DWI INDROTITO CAHYON [14.08]

Siap.

101. KETUA: SALDI ISRA [14.14]

Oke. Dan nanti kalau ada kabar akan kita beri perkembangannya. Tentu apa namanya ... Pihak Terkait senang-senang saja dia, enggak terlalu payah-payah, yang penting kan sudah diteken semua kan?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAKTI RIZA HIDAYAT [14.25]

Alhamdulillah sudah semua, Yang Mulia. Maturnuwun.

103. KETUA: SALDI ISRA [14.31]

Begitu juga dengan Kuasa Termohon, jadi kalau ada penarikan dan segala macamnya itu tidak akan ada implikasinya.

Mohon bersabar, kita akan mulai ... mik-nya dimatikan dulu, Pak Dwi. Kita mulai dari pemaparan untuk Permohonan Perkara 114, disilakan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [14. 59]

Baik. Terima kasih (...)

105. KETUA: SALDI ISRA [15.00]

Kabupaten Tapanuli Utara, poin-poinnya saja, ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [15.02]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Kita akan bacakan langsung poin-poin dari Perbaikan Permohonan yang sudah kita didaftarkan 10 Desember 2024.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat Indonesia.

Dengan hormat. Bersama ini, kami,

1. Nama: Satika Simomora.

2. Nama: Sarlandy Hutabarat.

Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa khusus, telah dalam hal ini memberikan kuasa kepada, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [15.00]

Ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [15.36]

Kesemuanya adalah Advokat, Kuasa Hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBH) Pusat PDI Perjuangan, dianggap dibacakan sesudahnya, Yang Mulia.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Hutatoruan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [15.36]

Ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [15.38]

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permo ... dalam ini mengajukan (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [15.40]

Permohonan.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [15.46]

Permohonan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terhadap penetapan HASIL Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.00 WIB.

Bagian pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [16:08]

Ya, Mahkamah berwenang. Tenggat waktunya masih memenuhi, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [16:10]

Masih, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [16:12]

Oke. Kedudukan Hukum?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP/-XXIII2025: ROY JANSEN SIAGIAN [16:15]

Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

117. KETUA: SALDI ISRA [16:18]

Ya, ini dianggap memiliki kedudukan, ya? kedudukan hukum, ya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [16:18]

Benar, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [16:24]

Oke, terus Pokok Permohonan, silakan.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [16:29]

Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasang calon sebagai berikut.

Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 58.643.

Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 105.505 suara.

121. KETUA: SALDI ISRA [16:49]

Ya, silakan lanjutkan.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [16:53]

Ya. Kemudian, Yang Mulia, untuk Poin 2 dianggap dibacakan.

123. KETUA: SALDI ISRA [16:56]

Ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [16:58]

Poin ketiga. Adapun pelanggaran-pelanggaran pemilihan bersifat terstruktur, sistematis, dan massif adalah sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini.

- a. Terstruktur. Pertama, keterlibatan, keberpihakan, dan ketidaknetralan Pj. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Dimposma Sihombing, S.Sos, MAP.
 - a. Bahwa Pj. Bupati sebelumnya adalah kepala dinas perizinan yang diangkat tahun 2015 dan dinonjobkan 2[sic!] tahun 2019 karena pelanggaran kode etik ASN, dimana Paslon 01 atas nama Satika Simamora, S.E. pada Tahun 2014-2019 merupakan istri dari Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, periode 2014-2019 dan 2019-2024. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024, Pj. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Dimposma Sihombing melakukan kegiatan senam massal bersama yang dihadiri oleh Kapolres Tapanuli Utara, Ernis Sitinjak, dan Dandim 0210/TU Letkol Inf. Saiful Rizal S.Hub. Int. dan Jonius Tarip ... dan Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat atau JTP yang merupakan Bakal Calon Bupati Tapanuli Utara di Taman Kota Tarutung yang dihadiri masyarakat Tapanuli Utara.

125. KETUA: SALDI ISRA [18:37]

Itu 16 Juni belum ada calon, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [18:33]

Benar, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [18:37]

Oke.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [18:33]

Oke. Pada tanggal 16 Juni sampai Agustus 2024, Pj. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Dimposma Sihombing menyelenggarakan Piala Pj. Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024, Turnamen Sepak Bola antarSMA, SLTA Sederajat se-Kabupaten Tapanuli Utara. Piala Pj. Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 yang kemudian dihadiri juga oleh Calon Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat.

129. KETUA: SALDI ISRA [18:36]

Itu kapan dihadiri?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [18:38]

16 Juni, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [18:39]

16 Juni, ya?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [18:40]

Benar, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [18:41]

Oke. Tapi masih belum calon, ya?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [18:43]

Belum, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [18:44]

Oke, lanjut.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [18:41]

Pada tanggal 5 Juni 2024, Pj. Bupati Tapanuli Utara, Dimposma, melaksanakan kegiatan jalan santai yang dihadiri oleh Bakal Calon Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran dan Kapolres Tapanuli Utara Ernis Sitinjak.

137. KETUA: SALDI ISRA [18:58]

Oke. Ini masih bulan Juni, terus apalagi?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [19:03]

Langsung kita ke f, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [19:09]

F.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [19:09]

Bahwa terlaksananya kegiatan senam massal dan jalan santai sebagaimana diuraikan di atas adalah atas dasar adanya permintaan dari Fraksi Nusantara DPRD Provinsi Sumatera Utara yang saat itu diketuai oleh Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat yang saat itu sudah mencitrakan dirinya sebagai Bakal Calon Bupati Tapanuli Utara, pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

141. KETUA: SALDI ISRA [19:29]

Oke, terus?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [19:27]

Kemudian bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, di Gedung Kesenian Sopo Partungkoan, Tarutung, Pj. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Dimposma Sihombing dengan Kapolres Tapanuli Utara dan Kajari Tapanuli Utara mengundang seluruh kepala desa dalam acara pemilihan hukum dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

143. KETUA: SALDI ISRA [19:51]

Oke. Jadi ini ada masalah apa dengan ini? Kampanye enggak (...)

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [19:54]

Di sini (...)

145. KETUA: SALDI ISRA [19:56]

Kampanye enggak di situ? Pilih ini enggak?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [19:57]

Di sini kita berusaha membuktikan keterkaitan antara (...)

147. KETUA: SALDI ISRA [20:01]

Bukan, apa yang dilakukan di situ?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [20:03]

Dengan kepala desa, bagaimana mereka berusaha memperkuat jalinan yang perlu disusun, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [20:09]

Oke. Ada buktinya, ya?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [20:10]

Baik, Yang Mulia (...)

151. KETUA: SALDI ISRA [20:11]

Nanti kita cek (...)

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [20:11]

Ada, Yang Mulia (...)

153. KETUA: SALDI ISRA [20:12]

Terus.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [20:14]

Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Pj. Bupati Dr. Dimposma Sihombing melarang dan mengusir Satpol PP yang sedang melaksanakan tugasnya di TPS 2 Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, padahal sesuai dengan Surat Edaran Nomor ... Menteri Dalam Negeri

Nomor 300 dan seterusnya tentang Peningkatan kesigi ... Kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, dan seterusnya. Pada intinya, telah memerintahkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di sekitar wilayah TPS pada saat pemungutan suara dan perhitungan hasil pemungutan suara.

Kemudian, lanjut, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [20:47]

Ini satpam diusir?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [20:49]

Satpol PP, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [20:50]

Satpol PP. Oke.

Itu poin kedua, lanjut. Enggak usah dibacakan semuanya. Ini kalau dibacakan semuanya bisa panjang ceritanya ini.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [20:57]

Baik. Poin kedua, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [20:58]

Ya.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [20:59]

Keterlibatan, keberpihakan, dan ketidaknetralan Pj. Sekda Kabupaten Tapanuli Utara, Ir. David Sipahutar, M.Si. Bahwa Pj. Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Ir. David Sipahutar, M.Si. mengarahkan kepada ASN dan Pejabat Tapanuli Utara, bidang sosialisasi dan monitoring, serta bidang analisa evaluasi dan pelaporan agar tidak melakukan monitoring di TPS-TPS pada saat hari pemungutan suara.

161. KETUA: SALDI ISRA [21:22]

Itu kapan diperintahkan, Pak?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [20:26]

Ada buktinya nanti, Yang Mulia. Kita tunjukkan nanti, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [21:27]

Ya, ini kita kasih tanda tanya, ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [21:30]

Ya, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [21:31]

Lanjut.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [21:32]

Saya lanjut, langsung ke nomor tiga, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [21:33]

Ya.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [21:35]

Keterlibatan, keberpihakan, dan ketidaknetralan Kapolres Tapanuli Utara AKBP, Ernis Sitinjak, S.H., S.I.K.

169. KETUA: SALDI ISRA [21:42]

Oke. Poinnya saja, ya. Kita sudah bisa catat itu. Yang sistematisnya, halaman 12.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [21:51]

Baik, Yang Mulia. Langsung sistematis.

171. KETUA: SALDI ISRA [21:53]

Ya.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [21:56]

Hal mana dapat dibuktikan berdasarkan.

- a. Bahwa telah terjadi pergantian PJU Polres Tapanuli Utara, dua hari setelah penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ditujukan untuk membantu mendukung kemenangan Paslon Nomor Urut 2 (vide Bukti P-33). Bahwa apal ... aparat Polres Tapanuli Utara melakukan pemanggilan kepada camat dan kepala desa di wilayah Tapanuli Utara yang sudah menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

173. KETUA: SALDI ISRA [22:19]

Dipanggil, diapakan, Pak?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [22:21]

Dipanggil untuk diperiksa, Pak.

175. KETUA: SALDI ISRA [22:23]

Diperiksanya, lalu disuruh memilih, gitu?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [22:26]

Ada LP-nya, Pak. Ada surat panggilan kepolisiannya.

177. KETUA: SALDI ISRA [22:30]

Ya, surat panggilannya, ya.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [22:31]

He em.

179. KETUA: SALDI ISRA [22:32]

Nanti (...)

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [22:32]

Nanti ada saksi kita yang untuk menguatkan itu, Yang Mulia.

181. KETUA: SALDI ISRA [22:35]

Oke. Jadi ini dipanggil, ya kalau panggil, memang polisi boleh manggil, kan?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [22:39]

Baik, Yang Mulia. Hanya saja itu di masa pilkada, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [22:41]

Ndak, kalau masa pilkada enggak boleh dipanggil?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [22:44]

Bukan tidak boleh, tapi setidaknya, Yang Mulia, kita menjadi menganggap bahwa itu ada kepiting di balik batu (...)

185. KETUA: SALDI ISRA [22:56]

Oh (...)

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [22:56]

Begitu, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [22:57]

Kepiting di balik batu itu terjepit, Pak?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [22:59]

Menjepit, Yang Mulia. Bukan udang, Yang Mulia, ya.

189. KETUA: SALDI ISRA [23:01]

Ya, silakan. Itu sistematisnya, apa lagi yang paling menonjol yang mau disampaikan?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [23:06]

Bahwa aparat Polres Tapanuli Utara juga melakukan pemanggilan kepada kepala sekolah di wilayah Tapanuli Utara dengan tujuan mengarahkan dukungan politik ... pilihan politik dalam Pilkada 2024 yang disamarkan dengan adanya penyelidikan penggunaan dana desa dan dana biaya operasional sekolah atau BOS (...)

191. KETUA: SALDI ISRA [23:22]

Oke (...)

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [23:22]

Untuk kepala sekolah.

193. KETUA: SALDI ISRA [23:25]

Terus, apa lagi?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [23:26]

Kemudian bahwa Polres Tapanuli Utara melakukan kriminalisasi dengan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Rudi Zaenal Siombing yang merupakan tim inti pemenangan Pemohon, juga Plt. Kepala BSPN, Badan Saksi pem ... Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Cabang Tapanuli Utara yang bertujuan untuk melumpuhkan pergerakan tim pemenangan.

195. KETUA: SALDI ISRA [23:43]

Oke.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [23:44]

Kemudian KPU Kabupaten Tapanuli Utara (...)

197. KETUA: SALDI ISRA [23:45]

Ini kayak orang mau perang saja, Bapak. Melumpuh itu kan kayak (...)

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [23:49]

Dalam konteks pilkada, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA [23:51]

Ya, silakan. Supaya jangan terlalu serius, Bapak itu.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [23:55]

Baik, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [23:57]

Silakan.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [23:58]

Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara secara dengan sengaja hanya melakukan bimbingan teknis kepada tiga orang dari tujuh orang KPPS di setiap TPS di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengakibatkan tidak kompeten atau profesionalnya empat orang anggota KPPS lain.

203. KETUA: SALDI ISRA [24:17]

Oke.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN

Itu, Yang Mulia.

205. KETUA: SALDI ISRA [24:17]

Lanjut.

Ada ya, poin berapa yang paling mau Bapak sampaikan? Ini banyak sekali poinnya ini. Wah, sampai L juga ini.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [24:23]

Mungkin (...)

207. KETUA: SALDI ISRA [24:26]

Yang masifnya, Pak, ya. Kita lanjut massif ya, halaman 18. Atau ada poin yang mau Bapak sampaikan yang jadi perhatian khusus?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [24:34]

Poin I dan J, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [24:35]

I dan J. Oke, silakan, I dan J-nya.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [24:43]

Bahwa Kapolsek Sipoholon, yaitu AKP Raymond tapi boleh memanggil dan mengumpulkan seluruh kepala desa se-Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, di Kota Balige, Kabupaten Toba, yang ternyata panggilan tersebut bertujuan untuk mempertemukan kepala-kepala desa dengan Calon Bupati Nomor Urut 2. Kepala-kepala desa tersebut tidak tahu sebelumnya bahwa mereka akan dipertemukan dengan Calon Bupati Nomor Urut 2. Pada pertemuan tersebut, JTP mengatakan kepada para kepala desa, jika tidak bekerja sama dengan JTP, maka jangan juga bergerak untuk pasangan calon lain.

211. KETUA: SALDI ISRA [25:12]

Ini ada Bukti P-11, itu apa itu?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:15]

Bukti P-11, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [25:16]

Apa itu yang Bapak sajikan?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:17]

P-11 adalah rekaman video CCTV pengakuan beberapa kepala desa, Yang Mulia.

215. KETUA: SALDI ISRA [25:20]

Oh, tapi kan bukan di tempat kejadian. Ada enggak di tempat kejadian itu videonya?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:27]

Foto-foto saja, Yang Mulia.

217. KETUA: SALDI ISRA [25:28]

Foto-foto ya, itu bukti berapa?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:27]

12 (...)

219. KETUA: SALDI ISRA [25:37]

Oke.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:30]

Nanti, Yang Mulia, kita (...)

221. KETUA: SALDI ISRA [25:32]

Ini yang P-11 ini video yang mewawancarai kepala desa itu, ya?
(...)

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:43]

Ya, Yang Mulia.

223. KETUA: SALDI ISRA [25:37]

Bukan tempat kejadian, ya?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:43]

Bukan.

225. KETUA: SALDI ISRA [25:46]

Ini satu mengangguk, satu menggeleng, susah juga saya membedakannya.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:48]

Bukan, Yang Mulia, itu memang kepala desanya ditanyakan, Yang Mulia.

227. KETUA: SALDI ISRA [25:50]

Oke, kepala desanya ditanya, lalu direkam.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:54]

Ya. Benar, Yang Mulia.

229. KETUA: SALDI ISRA [25:49]

Dan itu yang disampaikan ke Mahkamah, ya?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:50]

Benar, Yang Mulia.

231. KETUA: SALDI ISRA [25:50]

Oke.
Lanjut, J apa?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:55]

Bahwa KPU selaku penyelenggara sangat patut diduga melakukan pelanggaran secara sistematis dengan meloloskan calon wakil bupati yang tidak memenuhi syarat.

Bahwa terdapat perbedaan nama dan ijazah dengan KTP elektronik di mana yang tercantum dalam ijazah SMU adalah Deni Parlindungan, tanggal lahir 14 Januari 1978, sementara pada KTP elektronik yang tercantum adalah Deni Parlindungan Lumbantoruan, tanggal lahir 14 Januari 1979. Namun dalam berkas pendaftaran pencalonan tidak dilampirkan selain penetapan pengadilan perubahan nama dan tahun lahir. Sementara dalam keputusan KPU RI yang menyatakan dalam hal terdapat perubahan nama calon, maka harus dilampirkan keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon.

233. KETUA: SALDI ISRA [27:]

Oke.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [27:11]

Bahwa nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 di KTP Elektronik tertulis Deni Parlindungan Lumbantoruan berubah menjadi Deni Parlindungan pada ijazah SMU yang mana hal tersebut melanggar, selanjutnya sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

235. KETUA: SALDI ISRA [27:00]

Oke. ini Termohon Anda perhatikan ini ya, harus dijelaskan nanti ya, dijawab. Lanjut.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [27:11]

L, Yang Mulia.

237. KETUA: SALDI ISRA

L.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [27:13]

Bahwa terhadap ... selain daripada hal yang telah diuraikan di atas, Pasangan Calon Bupati Nomor 1 juga telah mengajukan berbagai laporan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan kampanye pilkada serentak. Selanjutnya dibacakan, Yang Mulia.

239. KETUA: SALDI ISRA [27:27]

Ini ... ini yang ada dalam tabel ini bukti laporan semua?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [27:31]

Ya.

241. KETUA: SALDI ISRA [27:31]

Dilaporkan ke mana ini?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [27:31]

Ke Bawaslu, Yang Mulia.

243. KETUA: SALDI ISRA [27:34]

Semuanya ke Bawaslu, ya?

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [27:33]

Benar, Yang Mulia.

245. KETUA: SALDI ISRA [27:32]

Ada jawaban Bawaslu?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [27:40]

Izin, Yang Mulia. Ditolak semua kecuali satu, Yang Mulia.

247. KETUA: SALDI ISRA [27:41]

Apa yang satu itu?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [27:44]

Yang dijawab mereka di nomor ... laporan nomor 1, Yang Mulia, itu 022 tentang syarat formil bakal calon.

249. KETUA: SALDI ISRA [27:50]

Oke, tapi selebihnya mereka tolak, ya?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [27:52]

Ya, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Untuk (...)

251. KETUA: SALDI ISRA [27:53]

Tunggu dulu, pertanyaan saya Bapak jawab dulu (...)

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [27:54]

Oh, ya. Siap.

253. KETUA: SALDI ISRA [27:55]

Mereka tolak semua?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [27:56]

Izin, Yang Mulia. Ada satu rekomendasi dilanjutkan.

255. KETUA: SALDI ISRA [28:03]

Ya.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [28:05]

Laporan kami bahwa telah terjadi penukaran satu blok surat suara dari atas meja TPS.

257. KETUA: SALDI ISRA [28:11]

Oke.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [28:14]

Itu yang dilanjutkan rekomendasi oleh Bawaslu, Yang Mulia.

259. KETUA: SALDI ISRA [28:16]

Oke.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [28:16]

Dari 24 laporan ini, lainnya ditolak.

261. KETUA: SALDI ISRA [28:17]

Jadi 22-nya ditolak, ya?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [28:19]

Ya.

263. KETUA: SALDI ISRA [28:19]

Nanti Bawaslu, ya. Ini poin untuk dijelaskan. Lanjut, poin berapa lagi?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [28:22]

Izin, Yang Mulia (...)

265. KETUA: SALDI ISRA [28:23]

Ya.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [28:23]

Untuk itu ... untuk L (vide Bukti P-12D) nanti akan kami tambahkan menjadi ... kami tambahkan (vide P-42) juga, Yang Mulia (...)

267. KETUA: SALDI ISRA [28:31]

Oke.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [28:32]

Sehingga laporan-laporannya kami akan susun nanti di dalam ... yang persidangan selanjutnya.

269. KETUA: SALDI ISRA [28:38]

Oke.

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [28:39]

Vide 42.

271. KETUA: SALDI ISRA [28:40]

Masif? Apa yang masif ini?

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [28:41]

Masif.

Pertama bahwa telah terjadi peningkatan perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 secara tidak wajar di Kecamatan Tarutung yang diakibatkan oleh pelanggaran terstruktur sistematis dan masif yang mana dibuktikan sebagai berikut.

- a. Terjadi pelanggaran tata cara perhitungan ... pemungutan perhitungan suara di TPS-TPS wilayah tersebut, seperti contoh yang terjadi di TPS 04 Desa Simamora Kecamatan Tarutung, dimana petugas KPPS melakukan penukaran 120 surat suara tercoblos dengan 120 surat suara yang sudah dicoblos dan dipersiapkan sebelumnya (vide Bukti P-13), sehingga Paslon 02 (...)

273. KETUA: SALDI ISRA [29:21]

Sebentar, sabar. Bukti P-13 ini apa bentuknya?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [29:27]

Videonya, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA [29:28]

Videonya.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [29:30]

Video penukaran surat suara itu.

277. KETUA: SALDI ISRA [29:37]

Itu di TPS-nya saksi pasangan calon tanda tangan atau tidak?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [29:40]

Nanti akan kita ambilkan, Yang Mulia.

279. KETUA: SALDI ISRA [29:42]

Sudah ... sudah lihat atau belum?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [29:43]

Saya ... nanti akan kita (...)

281. KETUA: SALDI ISRA [29:44]

Bukan, bukan nanti, kan harusnya tahu juga, itu di TPS itu ada masalah, mestinya kan ... apa namanya ... saksi pasangan calon tidak tanda tangan.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [29:53]

Izin, Yang Mulia. Yang memvideokan bukan saksi dari pasangan calon.

283. KETUA: SALDI ISRA [29:57]

Ya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [29:58]

Tapi dari (...)

285. KETUA: SALDI ISRA [29:59]

Ya.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [30:00]

Dari masyarakat yang (...)

287. KETUA: SALDI ISRA [30:01]

Oke.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [30:01]

Yang mengikuti yang memilih di TPS tersebut.

289. KETUA: SALDI ISRA [30:04]

Itu ... itu, oke.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [30:05]

Baik.

291. KETUA: SALDI ISRA [30:05]

Tapi pertanyaan saya, itu di bukti yang ditandatangani oleh saksi pasangan calon, tanda tangan atau tidak saksinya?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [30:15]

Pada saat itu sudah kita laporkan di tingkat rekapitulasi, Yang Mulia.

293. KETUA: SALDI ISRA [30:05]

Oke, oke.

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [30:05]

Dan juga sudah dilaporkan ke Bawaslu (...)

295. KETUA: SALDI ISRA [30:21]

Tapi ... tapi masih belum jawab pertanyaan saya yang Bapak jawab itu.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [30:22]

Baik, Yang Mulia. Nanti (...)

297. KETUA: SALDI ISRA [30:23]

Nanti kita cek, ya.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [30:24]

Nanti kita cek, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [30:26]

Ini kan penting, kalau ada kejadian mestinya saksi tidak tanda tangan, setidaknya-tidaknya memberikan catatan keberatan. Nah, itu yang kita periksa, ya.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [30:39]

Baik, Yang Mulia.

301. KETUA: SALDI ISRA [30:40]

Lanjut.

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [30:28]

Izin, Yang Mulia.

Sehingga Paslon 02 memperoleh 268 suara dan Pemohon memperoleh 111 suara. Bahwa jika penukaran 120 suara ... surat suara tersebut dikurangkan dengan perolehan 268 suara Paslon Nomor 02, maka Paslon Nomor 02 memperoleh suara sebanyak 148 suara dan Pemohon seharusnya [sic!] bertambah menjadi 231 suara.

303. KETUA: SALDI ISRA [31:02]

Oke, lanjut.

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [31:04]

Bahwa bila dihitung dengan probabilitas dikalikan dengan 120 suara diambil ditukar sekitar 31,2%, kemudian apabila dikalikan dengan 638 TPS di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara, dimana suara Paslon Nomor 02 sebesar 105 ... 505 suara dikurangkan 31,2%, maka perolehan suara seharusnya menjadi 72.587 suara dan suara Pemohon menjadi 58.643 ditambah 32.918, maka perolehan suara Pemohon seharusnya menjadi sebesar 91.561 suara atau setara 55,7%.

305. KETUA: SALDI ISRA [31:46]

Oke. Jadi, kejadian di TPS yang dicontohkan tadi itu digunakan sebagai asumsi terhadap semua TPS, ya?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [31:53]

Benar, Yang Mulia.

307. KETUA: SALDI ISRA [31:54]

Oke, lanjut.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [31:57]

Bahwa uraian tersebut di atas didasarkan keterangan Saksi Saudara Melda Sihotang dan saksi lainnya yang melihat terjadi hal yang berupa penukaran surat suara di TPS-TPS pada kecamatan lain.

309. KETUA: SALDI ISRA [32:07]

Oke, lanjut.

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [32:10]

Selanjutnya bahwa penukaran surat suara tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara.

311. KETUA: SALDI ISRA [32:17]

Ya, nanti dijelaskan oleh Bawaslu. Poin berapa lagi?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [32:20]

Baik.

Kedua. Bahwa Kecamatan Siatas Barita yang kepala-kepala desanya dikumpulkan oleh Kapolsek Sipoholon.

Yang ketiga, Yang Mulia. Bahwa pada Kecamatan Tarutung yang camat dan kepala-kepala desanya dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim.

Keempat, Yang Mulia. Pada kecamatan Simangumban yang kepala-kepala desa dan PLT Kepala Desa dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim.

313. KETUA: SALDI ISRA [32:43]

Terus?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [32:44]

Ini, Yang Mulia, berusaha membuktikan bahwa kepala-kepala di wilayah-wilayah yang dipanggil sesuai dengan alat bukti yang ada, yang dilakukan [sic!] Prinsipal itu sehingga suaranya naik signifikan.

315. KETUA: SALDI ISRA [32:56]

Naik signifikan, ya?

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [32:58]

Baik, begitu.

317. KETUA: SALDI ISRA [33:04]

Silakan (...)

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [33:06]

Bahwa pada Kecamatan Pahae Julu, yang camat-camatnya dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara.

Selanjutnya empat. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara ataupun Kapolres Tapanuli Utara sebagaimana kami uraikan dalam tabel di atas.

319. KETUA: SALDI ISRA [33:17]

Oke.

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [33:18]

Namun, saat ini tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Tapanuli Utara maupun Kapolres Tapanuli Utara.

321. KETUA: SALDI ISRA [33:20]

Tadi itu sudah disampaikan, nanti biar dijawab oleh Bawaslu.

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [33:23]

Baik, Yang Mulia.

323. KETUA: SALDI ISRA [33:24]

Ini poin lima tidak perlu, ya?

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [33:25]

Ya, Yang Mulia.

325. KETUA: SALDI ISRA [33:26]

Poin enam, poin tujuh tidak. Kita langsung Petitem, silakan.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [33:32]

Izin, Yang Mulia.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah kami bacakan di atas, dengan ini kami Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut.

Yang pertama, mohon mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan 4 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sepanjang mengenai perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Deni Parlindungan Lumbantoruan.

327. KETUA: SALDI ISRA [34:22]

Terus.

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [34:23]

Yang ketiga. Membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan sebagai pemenang atau calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Yang keempat. Mohon memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Satika Simamora dan Sarlandi Hutabarat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 atau apabila Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan banyak terima kasih.

329. KETUA: SALDI ISRA [34:22]

Terima kasih.

Jadi ini permohonannya berbasis TSM.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [34:25]

Benar, Yang Mulia.

331. KETUA: SALDI ISRA [34:36]

Jadi bukan persoalan angka, basisnya TSM dengan yang diuraikan tadi dan ujungnya minta mendiskualifikasi pasangan calon nomor berapa?

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [34:40]

Nomor Urut 2.

333. KETUA: SALDI ISRA [34:42]

Nomor urut 2 dan lalu menetapkan Pasangan Calon Nomor 1 sebagai paslon terpilih. Itu ya, kira-kira intinya, ya?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [34:45]

Benar, Yang Mulia.

335. KETUA: SALDI ISRA [34:46]

Cukup, ya?

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [34:47]

Cukup, Yang Mulia.

337. KETUA: SALDI ISRA [34:48]

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup. Yang Mulia? Oke, terima kasih sudah disimak dengan baik oleh Termohon, Pihak Terkait, dan juga oleh Bawaslu.

Itu tolong itu yang disebut-sebut harus membersihkan dirinya di pertemuan berikutnya, menjelaskan benar atau tidak tuduhan itu atau paling tidak Dalil itu.

Oke, terima kasih. Baru kami dapat ... apa ... kabar bahwa Pak Umar yang dihubungi, membenarkan bahwa menarik permohonan ini. Oke. Dengan demikian, nanti kami akan apa ... akan apa ... akan bahas penarikan ini dan itu berarti kalau Termohon mau menjelaskan boleh juga sih karena sudah terlanjur tanda tangan kontrak kan Pihak Terkait juga, gitu.

Jadi, Pak Dwi kalau mau di dalam ruangan juga enggak apa-apa, kalau mau keluar bareng nanti bersama. Enggak usah buru-buru juga kan, jarang-jarang juga dapat suasana persidangan kayak begini, nih. Oke.

Selanjutnya, kita minta ... apa ... untuk Perkara 167 Kota Binjai, menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

Silakan, siapa dari online?

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia,

339. KETUA: SALDI ISRA [36:28]

Halo, silakan.

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [36:30]

Siap, Yang Mulia.
Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (...)

341. KETUA: SALDI ISRA [36:35]

Itu suaranya masih terlalu jauh, Pak, enggak bisa kita dengar dari sini. Suaranya enggak klir, enggak kedengaran.

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [36:55]

Permohonan (...)

343. KETUA: SALDI ISRA [36:58]

Nah, itu belum juga, Pak, belum kedengaran. Halo, halo? Yang lebih dekatlah itu, kasih pusat kekuasaan suara itu kepada yang mau menyampaikan.

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [37:27]

Permohonan Pembatalan Keputusan (...)

345. KETUA: SALDI ISRA [37:28]

Nah, itu baru jelas, silakan.

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [37:29]

Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 tentang Penetapan Hasil Pemilihan (ucapan tidak terdengar jelas) Pemilihan Umum (ucapan tidak terdengar jelas) Kota Binjai Tahun 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

Dengan hormat. Bersama ini kami, nama Donal Anjar Simanjuntak.

347. KETUA: SALDI ISRA [38:01]

Oke, enggak usah dibacakan lagi, Bapak terus ke ... ini Kewenangan Mahkamah, ada wewenang, ya. Tenggang waktu bagaimana?

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [38:07]

Benar, Yang Mulia.

349. KETUA: SALDI ISRA [38:13]

Apanya yang benar? Apakah permohonan ini masih memenuhi tenggat waktu atau tidak?

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [36:27]

Masih, Yang Mulia.

351. KETUA: SALDI ISRA [38:29]

Oke, nanti kita cek, ya.
Kedudukan Hukum Pemohon, silakan.

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [38:40]

Pokok Permohonan.

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon. Perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 adalah sebagai berikut.
Tingkat keduanya.
- b. bahwa dari hasil Berita Acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tersebut di atas menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai dengan Nomor Urut [sic!] 3 berada di peringkat 2, sedangkan peringkat pertama adalah Pasangan Nomor 4 Amir Hamzah – Hasanul Jihadi.
- c. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun

2024 yang ditetapkan oleh Termohon. Karena menurut Pemohon, perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 Amir Hamzah - Hasanul Jihadi tersebut dinilai cacat hukum karena dilaksanakan di tengah keadaan force majeure yang secara nyata telah merusak integritas proses pemilihan.

353. KETUA: SALDI ISRA [41:15]

Jadi, ini ada kondisi banjir, ya? Halo?

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [41:28]

Halo, Yang Mulia.

355. KETUA: SALDI ISRA [41:32]

Silakan. Anda duduk saja, enggak usah berdiri nanti (...)

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [41:38]

Bahwa keputusan KPU untuk tetap melaksanakan pemungutan suara di tengah bencana banjir adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam situasi bencana. KPU seharusnya megedepankan kepentingan masyarakat dengan menunda pemungutan suara, hingga kondisi memungkinkan.

357. KETUA: SALDI ISRA [41:59]

Oke, itu poinnya enggak usah dibacakan semua. Halo?

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [41:59]

Semestinya memastikan (...)

359. KETUA: SALDI ISRA [42:01]

Halo?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [42:02]

Seluruh Warga Kota Binjai memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilih mereka tanpa hambatan. Kondisi ini menciptakan ketidakwajaran dalam proses pemilu, dimana terdapat ketimpangan signifikan dalam partisipasi antar TPS di wilayah yang sama. Tindakan ini mengindikasikan kelalaian KPU dalam menjamin hak pilih setiap pemilih sesuai dengan asas keadilan yang berpotensi menimbulkan manipulasi data pemilih dan merugikan salah satu pihak dalam pilkada.

361. KETUA: SALDI ISRA [42:41]

Oke, cukup, ya? Enggak usah dibacakan semua, kita sudah tangkap, Anda pada intinya keberatan pilkada diadakan ketika ada kondisi darurat, force majeure itu, yaitu kondisi banjir.

Nah, oke. Ini ada contoh beberapa kecamatan ya yang Anda ambil ke kelurahan di kecamatan tertentu yang angkanya sudah disampaikan.

Jadi, ada enggak yang mau Anda berikan penekanan, di mana di antara contoh dalam tabel-tabel ini yang mau dijelaskan, satu atau dua saja?

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEDI HERMAWANSYAHPUTRA [43:25]

(Suara tidak terdengar jelas)

363. KETUA: SALDI ISRA [43:28]

Ya, silakan. Anda cari poin-poinnya angka satu atau dua, nanti yang selebihnya dianggap telah diucapkan atau dibacakan.

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [43:48]

Assalamualaikum wr, wb., Yang Mulia.

365. KETUA: SALDI ISRA [43:51]

Ya.

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [43:51]

Izinkan saya, Yang Mulia, ingin menjelaskan tentang masalah atau permohonan kami (Suara tidak terdengar jelas).

Sebelum itu, Yang Mulia. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang geografis Kota Binjai, Yang Mulia. Kota Binjai memiliki 5 kecamatan.

367. KETUA: SALDI ISRA [44:16]

Ya.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [44:17]

Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Selatan, Binjai Barat, dan Binjai Utara.

Pada tanggal 26 November 2024, telah terjadi hujan yang cukup deras hingga mengakibatkan naiknya air sungai yang melewati Kota Binjai, baik itu Sungai Binai, Sungai Mancirin, dan Sungai Bangkatan. Dengan hal itu berdampak terhadap 5 kecamatan yang berada di Kota Binjai, Yang Mulia.

369. KETUA: SALDI ISRA [44:50]

Oke.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [44:53]

Saya ambil contoh di Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan Binjai pada point a. Ya, Yang Mulia?

371. KETUA: SALDI ISRA [44:03]

Ya, silakan.

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [44:06]

Di sini, pada TPS 02, 03, 04, dan 05 telah terkena dampak dari hujan deras yang mengakibatkan banjir, yaitu jam buka TPS dan jam buk ... jam tutup TPS tidak sesuai, Yang Mulia. Karena sudah melewati pada Pukul 07.00 WIB.

373. KETUA: SALDI ISRA [45:34]

Oke.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [45:35]

Dan rendahnya pengguna suara di TPS 004 dan 005, Yang Mulia.

Lanjut, sebelum saya menjelaskan tentang tabel ini, Yang Mulia. KPU Kota Binjai mengambil sikap melakukan PSS Pemengutan Suara Susulan pada 20 TPS yang berada di Kecamatan Binjai Kota, Yang Mulia, yang mana dampak dari hujan atau force majeure yang dialami oleh Kota Binjai itu berdampak di 5 kecamatan. Akan tetapi, KPU Kota Binjai hanya melakukan 20 PSS di 20 TPS di 1 Kecamatan Kota Binjai dan di 3 kelurahan, Yang Mulia. Rasa [sic!] saya, menurut hemat kami, itu merupakan ketidakadilan terhadap hak konstitusi warga Kota Binjai, Yang Mulia.

375. KETUA: SALDI ISRA [46:27]

Oke, cukup clear. Apa lagi?

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [46:34]

Ya, Yang Mulia. Di Kecamatan Binjai Kota, setiap tabel ini, Yang Mulia, sudah kami lampirkan berikut dengan C-1. Hasil di setiap tabel ini, Yang Mulia.

377. KETUA: SALDI ISRA [46:47]

Ya.

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [46:48]

Yang menunjukkan bahwa dampak dari force majeure itu terjadi di 5 Kecamatan Kota Binjai.

379. KETUA: SALDI ISRA [46:54]

Ya, jangan diulang-ulang juga. Sudah tahu kami tadi. Apa lagi yang mau disampaikan?

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [46:56]

Ya, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia.

381. KETUA: SALDI ISRA [46:58]

Jadi, ini keberatan Anda ya terhadap perubahan jadwal orang yang tidak datang, sehingga menghilangkan hak pilih, ya?

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [47:08]

(audio tidak terdengar jelas)

383. KETUA: SALDI ISRA [47:10]

Oke, kalau begitu, Saudara lanjut ke poin di halaman ... ini enggak ada juga halamannya ini. Setelah Kelurahan Limau Sundai itu, ada Point J di bawahnya itu. Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 6 kelurahan yang ada. Silakan.

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [47:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

385. KETUA: SALDI ISRA [47:35]

Ya.

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [47:36]

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 74 ayat (1) berbunyi, "Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi perusahaan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, Dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan.

Kemudian, dilanjut kepada Pasal 75 ayat (1), Yang Mulia, berbunyi, pemungutan suara dan atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksudkan pemungutan suara (...)

387. KETUA: SALDI ISRA [48:20]

Itu dianggap dibacakan, ya?

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [48:21]

Atau penghitungan suara lanjutan atau susulan (...)

389. KETUA: SALDI ISRA [48:23]

Bunyi pasalnya dianggap dibacakan.

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [48:24]

Pasal 73 dan pasal 74 dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.

391. KETUA: SALDI ISRA [48:30]

Oke, itu dianggap dibacakan. Terus poin O.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [48:39]

Oke lanjut, Yang Mulia.

Di poin K, Yang Mulia. Di poin C sedikit saya menjelaskan Mulia ... Yang Mulia, untuk masalah penundaan pemungutan suara, hal tersebut tidak ada dilakukan oleh KPU, Yang Mulia.

393. KETUA: SALDI ISRA [48:53]

Oke, jadi (...)

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [48:54]

Bahkan, di dalam Berita Acara Khusus mereka tidak ada menuangkan hal tersebut.

395. KETUA: SALDI ISRA [48:58]

Oke.

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [48:59]

Saya lanjut di poin K, Yang Mulia.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1), kegiatan pemungutan suara tidak dapat dilaksa ... dilaksanakan di Kota Binjai karena sedang terjadi bencana banjir dan hujan yang keras, sehingga masyarakat tidak dapat memberikan hak pilihnya karena terganggu oleh bencana banjir, baik secara psikologis maupun materiil.

397. KETUA: SALDI ISRA [49:22]

Oke. Apa lagi?

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [49:23]

Poin I. Ini dianggap yang sudah dibacakan, Yang Mulia.
Lanjut, Yang Mulia, pada poin N.

399. KETUA: SALDI ISRA [49:33]

Ya.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [49:35]

Bahwa berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di dalam poin b angka 3, yaitu, memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, maka dalam hal terdapat TPS yang harus terhenti pelayanannya kepada pemilih dikarenakan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemberian pelayanan hak memilih kepada pemilih seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara memungkinkan untuk surut dalam waktu beberapa jam dan/atau mengakibatkan tidak bisa hadir dikarenakan terkendala hujan tersebut, maka.

- a. Waktu pengumuman suara dapat diperpanjang selama tidak menlampaui total durasi 6 jam.
- b. Sebelum perpanjangan durasi waktu pemberian suara sebagaimana tersebut, KPPS meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara.
- c. Permohonan persetujuan di atas beserta hasilnya dicatat dalam Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dilengkapi dengan para saksi dan pengawas TPS pada bagian akhir catatan tersebut.

401. KETUA: SALDI ISRA [49:52]

Oke, clear.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [49:53]

Untuk hal ini, Yang Mulia, sama sekali tidak ada dilakukan, Yang Mulia.

403. KETUA: SALDI ISRA [49:58]

Oke, Anda langsung ke Petitem (...)

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [49:58]

Atau dilanjutkan (...)

405. KETUA: SALDI ISRA [49:59]

Petitem.

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [50:00]

Ya, Yang Mulia?

407. KETUA: SALDI ISRA [50:01]

Langsung, ke Petitem.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [50:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka izinkan kami, Yang Mulia, mewakili Prinsipal kami sebagai Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan.
 - a. Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Binjai Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, pukul 18.11 WIB [sic!].

- b. Keputusan KPU Kota Binjai No 490 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai pada Tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Binjai di Kota Binjai.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum. wr.wb. Selamat malam.

409. KETUA: SALDI ISRA [52:25]

Walaikumsalam. Terima kasih.
Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia Pak Arsul?
Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup. Terima kasih.
Tolong dimatikan itu apanya.
Ya, sekarang kita lanjut ke Permohonan Nomor 183. ...

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [52:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

411. KETUA: SALDI ISRA [52:27]

Pamekasan.

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [52:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dalam permohonan berjumlah 52 halaman ini, Pemohon mengajukan objek Permohonan adalah Keputusan KPU Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Langsung saja, Yang Mulia.

413. KETUA: SALDI ISRA [53:08]

Ya.

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [53:09]

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena ini sudah Kewenangan MK, maka MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan ... menerima dan mengadili, memutuskan permohonan ini.

Kemudian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yakni pada tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, Yang Mulia. Untuk Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, dalam permohonan ini ada ketentuan batas selisih suara yang berlaku dilekatkan dengan jumlah penduduk pada Kota Pamekasan ini adalah sebesar 1% atau sedianya selisih ambang batasnya adalah 5.722 suara ... 5.723 suara, sementara selisih antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dalam pilkada ini adalah 27.506 suara.

Akan tetapi, Yang Mulia, di dalam permohonan ini, Pemohon meminta agar memohon agar Mahkamah melakukan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 karena ada beberapa alasan yang pokok-pokoknya saya sebutkan, nanti dijelaskan oleh rekan kami, Yang Mulia.

Pertama karena terdapat dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), antara lain adanya juga pelanggaran yang bersifat cacat prosedur yang dilakukan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan melibatkan KPPS selaku penyelenggara pemilu dilakukan secara terencana, sistematis dan meluas secara massif, setidaknya ada banyak TPS yang tingkat kehadirannya itu mencapai 100%. Padahal di dalam TPS tersebut, ada data-data pemilih yang sudah meninggal dunia, kemudian juga itu terjadi tersebar di 8 kecamatan, 34 desa, pada 114 TPS di Kabupaten Pamekasan.

Kemudian ada juga pelanggaran berupa ketidaknetralan penyelenggara, Yang Mulia, dalam Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Pamekasan ini yang tersebar di 13 Kecamatan, Kabupaten Pamekasan.

Kemudian ada juga pelanggaran berupa ketidaknetralan kepala desa, pelanggaran berupa pemilih mencoblos lebih dari satu kali atau coblos ganda, pelanggaran politik uang atau *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian pelanggaran berupa netralitas juga penyelenggara pemilu dan pelanggaran secara sistematis sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh KPPS tersebar dan merata di 5 kecamatan dari total 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan.

Untuk itu dalam bagian Legal Standing ini, Pemohon memohon agar Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158.

Selanjutnya untuk bagian Pokok Permohonan. Saya izin dilanjutkan oleh rekan kami, Bapak Abdul Kholis.

415. KETUA: SALDI ISRA [56:10]

Silakan, Pak Abdul Kholis. Poin-poinnya saja, Pak, ya.

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [56:15]

Siap. Mohon izin, Yang Mulia.

417. KETUA: SALDI ISRA [56:16]

Ya, dari tadi sudah diizinkan, Pak.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [56:20]

Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemekasan, sebagai berikut, kami anggap sudah dibacakan karena tadi sudah disebutkan oleh Mas Gugum.

419. KETUA: SALDI ISRA [56:33]

Ya.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [56:34]

Poin dua. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya cacat prosedur, kami anggap sudah dibacakan.

421. KETUA: SALDI ISRA [56:43]

Ya.

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [56:46]

Pemilih yang sudah meninggal dunia dan terdaftar dalam DPT namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Pamekasan, fakta yang terjadi di lapangan, orang yang sudah meninggal dunia dan terdaftar di DPT tapi digunakan orang lain untuk mencoblos dalam Pilkada Kabupaten Pamekasan, kejadian ini terjadi di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai berikut.

a. Kecamatan Pegantenan.

1. Di TPS 4 Desa Pasanggar, Kabupaten ... Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK ke bupati, Pemohon menemukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan sejumlah 6 orang.

423. KETUA: SALDI ISRA [57:37]

Oke, dianggap (...)

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [57:38]

Untuk selanjutnya (...)

425. KETUA: SALDI ISRA [57:39]

Dianggap dibacakan, ya.

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [57:40]

Dianggap dibacakan.

427. KETUA: SALDI ISRA [57:41]

Itu, itu semuanya nomor 2, nomor 3 itu, itu semua ya orang yang sudah meninggal?

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [57:46]

Ya siap, Yang Mulia. Semuanya sampai nomor 6. Dan kecamatan-kecamatan yang lain, termasuk di desa yang ... desa-desa yang lain di

Kecamatan pe ... Pegantenan ini juga, seperti TPS 05 Desa Pasanggar, kemudian TPS 06 Desa Palesanggar, dan TPS 08 Desa Palesanggar.

429. KETUA: SALDI ISRA [58:08]

Oke, itu kita anggap sampai halaman 23, ya?

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [58:11]

Ya. Siap, Yang Mulia.

431. KETUA: SALDI ISRA [58:13]

Oke, lanjut sekarang halaman 23, terjadinya pelanggaran politik uang.

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [58:20]

Baik. Terjadinya pelanggaran money politics atau politik uang yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02.

Bahwa dugaan pelanggaran politik uang atau money politic yang dilakukan ... yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02 dan tim suksesnya yang membagikan amplop berisi uang dan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02, peristiwa ini terjadi dan telah dilaporkan dan sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan dengan nomor register sebagai berikut. Nomor 001/Rek/TM/PB (...)

433. KETUA: SALDI ISRA [58:53]

Dan seterusnya. Oke.

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [58:56]

Ya.

435. KETUA: SALDI ISRA [58:56]

Terus.

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [58:57]

16 (...)

437. KETUA: SALDI ISRA [58:57]

Apa (...)

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [58:58]

Titik 28.

439. KETUA: SALDI ISRA [58:58]

Apa itu hasil laporannya?

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [59:00]

Hasil laporannya adalah sudah ditingkatkan ke tingkat lebih lanjut, yaitu ditingkatkan di Gakkumdu untuk tersangka, Yang Mulia.

441. KETUA: SALDI ISRA [59:09]

Sudah ada tersangkanya?

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [59:10]

Ya.

443. KETUA: SALDI ISRA [59:11]

Berapa orang tersangkanya?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [59:12]

Satu orang, Yang Mulia.

445. KETUA: SALDI ISRA [59:14]

1 orang. Oke, lanjut.

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [59:17]

Bahwa (...)

447. KETUA: SALDI ISRA [59:18]

Isi ... isi amplopnya berapa?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [59:19]

Rp 50.000,00, Yang Mulia.

449. KETUA: SALDI ISRA [59:22]

Oh, Rp50.000,00?

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [59:23]

Tidak dalam bentuk amplop, Yang Mulia, tapi langsung uangnya diperlihatkan, Yang Mulia.

451. KETUA: SALDI ISRA [59:26]

Oh, diperlihatkan begitu, ya?

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [59:27]

Ya, siap, Yang Mulia.

453. KETUA: SALDI ISRA [59:29]

Bapak terima juga, enggak?

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [59:31]

Terima sebagai Kuasa Hukum, Yang Mulia.

455. KETUA: SALDI ISRA [59:35]

Oke. C. Lanjut.

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [59:37]

Pelanggaran netralitas oleh kepala desa bahwa terdapat beberapa kepala desa yang melanggar netralitas dengan secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bahkan dilakukan sebelum penetapan pasan ... Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Ada beberapa kepala desa di Pantura mendukung Paslon Nomor Urut 2 dan telah menetapkan ... setelah penetapan pasangan calon, ditetapkan juga kepala desa yang melanggar netralitas kepada kepala desa.

457. KETUA: SALDI ISRA [01:00:03]

Oke. Pelanggaran oleh kepala desa ini, lanjut.
Pelanggaran berupa pemilih lagi, ya. Yang mencoblos lebih dari satu kali.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:00:13]

Pelanggaran berupa pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

459. KETUA: SALDI ISRA [01:00:16]

Ya.

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:00:16]

Bahwa, KPPS membiarkan terjadinya pelanggaran adanya warga yang memakai masker dan melakukan pencoblosan di kotak suara lebih dari satu kali di TPS 4 Desa Tebul Timur, sebagaimana yang dilampirkan di Bukti P-108.

461. KETUA: SALDI ISRA [01:00:28]

Oke.

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:00:32]

Bahwa selain kejadian tersebut di atas, kejadian pencoblosan lebih dari satu kali juga terjadi di TPS 8 Desa Waru Timur (...)

463. KETUA: SALDI ISRA [01:00:40]

Ya.

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:00:40]

Yang dilakukan oleh warga yang memakai kaos Paslon 02.

465. KETUA: SALDI ISRA [01:00:43]

Oke. Itu kita catat semua, ya.

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:00:45]

Oke.

467. KETUA: SALDI ISRA [01:00:45]

Enggak usah dibacakan semua.

Lanjut ke poin E, kejadian nama pemilih yang menggunakan haknya berdasarkan DPT, ternyata sudah meninggal dunia.

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:00:53]

Ya. Di TPS 1 Desa Lesong, kami anggap sudah dibacakan juga, dan kami hanya penguatan dari yang di depan, Yang Mulia.

469. KETUA: SALDI ISRA [01:00:59]

Oke. Ini pengulangan depan, ya. Sampai halaman berapa ini?

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:01:00]

Ya.

471. KETUA: SALDI ISRA [01:00:02]

Sampai halaman berapa, ini?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:01:03]

Sampai halaman (...)

473. KETUA: SALDI ISRA [01:01:08]

Ini orang matinya sudah di (...)

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:01:09]

33, Yang Mulia. Ini juga di Desa Keramat, Yang Mulia.

475. KETUA: SALDI ISRA [01:01:13]

33, oke.

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:01:16]

Di TPS 02 Desa Keramat, ini Kecamatan Tlanakan.

477. KETUA: SALDI ISRA [01:01:20]

Oke. Ini semuanya, sampai 35 itu juga kan, 36, 37, 38, 39. Ini cermat sekali ini menghitung jumlahnya, nanti kan harus dibuktikan ini.

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:01:34]

Siap, Yang Mulia. Sudah ada bukti-buktinya, Yang Mulia.

479. KETUA: SALDI ISRA [01:01:37]

Sampai nomor 90.

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:01:40]

Adanya pelanggaran, 44 (...)

481. KETUA: SALDI ISRA [01:01:41]

Sudah, ndak usah itu dibaca. Langsung ke poin f. Pokoknya. Satu (...)

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:01:46]

Adanya pelanggaran yang berupa intimidasi dan pengusiran terhadap Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh panitia.

483. KETUA: SALDI ISRA [01:01:52]

Oke.

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:01:53]

Bahwa terdapat pemilih Calon Bupati Pamekasan terdapat fakta dalam Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Pamekasan terjadi intimidasi dan pengusiran oleh panitia kepada saksi untuk menandatangani C-1 yang terjadi di beberapa TPS.

Bahwa akibat dari adanya intimidasi tersebut, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 merasa tertekan sebagaimana terjadi di TPS sebagai berikut, kami anggap sudah dibacakan.

485. KETUA: SALDI ISRA [01:02:20]

Tapi saksi-saksi ini semua tanda tangan, enggak?

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:02:22]

Tanda tangan, tapi berdasarkan tanda tangan ini, saksi sudah melakukan pernyataan, membuat surat pernyataan, adanya intimidasi dan tekanan di bawah, Yang Mulia.

487. KETUA: SALDI ISRA [01:02:33]

Oh, tekanan dari ... oke. Jadi ini semua yang ... apa ya ... yang (...)

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:02:36]

Yang 100%, kenapa tanda tangan?

489. KETUA: SALDI ISRA [01:02:39]

Oke.

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:02:39]

Artinya, secara logika begini, Yang Mulia.

491. KETUA: SALDI ISRA [01:02:40]

Ya.

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:02:42]

Ini, kenapa tanda tangan? Padahal sudah ada pelanggaran di dalamnya. Karena kami juga khawatir, nanti pada saatnya nanti, orang meninggal saja di Kabupaten Pamekasan ini nanti punya perwakilan di DPRD Kabupaten Pamekasan.

493. KETUA: SALDI ISRA [01:02:54]

Ya, ini kan bukan perwakilan DPRD, Pak. Ini ... ini untuk memilih kepala daerah.

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:02:58]

Atau jadi bupati, Yang Mulia.

495. KETUA: SALDI ISRA [01:02:59]

Ya. Ndak apa-apa juga, Pak, kalau mau, orang meninggal jadi Bupati, enggak masalah itu. Nanti semuanya akan kita cek ke Bawaslu, ya. G?

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:03:08]

Bahwa kehadiran pemilih di halaman 46 (...)

497. KETUA: SALDI ISRA [01:03:11]

Ya.

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:03:11]

Kehadiran pemilih 100%, padahal di daftar hadir pemilih tetap tidak ada yang tanda tangan.

499. KETUA: SALDI ISRA [01:03:17]

Ya.

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:03:18]

Ini di daftar hadir ternyata kehadiran 100%, tapi tidak tanda tangan, Yang Mulia, di TPS-TPS sebagai berikut, kami anggap sudah dibacakan.

501. KETUA: SALDI ISRA [01:03:27]

Ini semua, ya?

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:03:28]

Ya, siap, Yang Mulia.

503. KETUA: SALDI ISRA [01:03:30]

Oke.

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:03:31]

Kemudian yang kedua.

Bahwa kehadiran pemilih 100% padahal di daftar hadir, dimana tanda tangannya diduga dilakukan oleh satu orang karena tanda tangannya sama semua antara satu dengan yang lain.

505. KETUA: SALDI ISRA [01:03:41]

Ini ada dibuktikan semua, ya?

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:03:43]

Siap.

507. KETUA: SALDI ISRA [01:03:44]

Bukti berapa ini? Nanti di (...)

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:03:48]

Ini di (...)

509. KETUA: SALDI ISRA [01:03:49]

Nanti ... nanti kita cek, ya.

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:03:50]

Siap, Yang Mulia.

511. KETUA: SALDI ISRA [01:03:52]

Oke. Lanjut, Petitem.

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:03:57]

Petitem.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang sudah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil

sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada secara kasuistik dibuktikan dan diputuskan secara bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember Tahun 2024, pukul 01.00 WIB.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk Pemilukada ulang di Kabupaten Pamekasan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini,
atau
1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

513. KETUA: SALDI ISRA [01:05:12]

Oke.

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXII/2025: ABD. KHOLIS [01:05:13]

2. Mengabulkan permohonan dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada secara kasuistik dibuktikan secara bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

515. KETUA: SALDI ISRA [01:05:26]

Oke. Jadi ini bedanya, *yang* atau *berikutnya* ini mendiskualifikasi pasangan calon?

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXII/2025: ABD. KHOLIS [01:05:27]

Siap. Betul, Yang Mulia.

517. KETUA: SALDI ISRA [01:05:30]

Yang atau *berikutnya*?

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXII/2025: ABD. KHOLIS [01:05:33]

Perbedaannya cuma memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 7 kecamatan sepanjang di TPS-TPS yang disebutkan dan dilakukan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

519. KETUA: SALDI ISRA [01:05:45]

Oke (...)

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXII/2025: ABD. KHOLIS [01:05:49]

Berikut TPS-TPS nya akan kami bacakan, Yang Mulia (...)

521. KETUA: SALDI ISRA [01:06:03]

Oke. Ini 113 TPS, ya?

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXII/2025: ABD. KHOLIS [01:05:59]

Ya, Yang Mulia.

523. KETUA: SALDI ISRA [01:06:03]

Lanjut.

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXII/2025: ABD. KHOLIS [01:05:58]

Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon. Assalamualaikum wr. wb.

525. KETUA: SALDI ISRA [01:06:09]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Cukup.

Yang Mulia? Cukup, ya.

Jadi, ini sudah disampaikan, sudah didengar oleh semua pihak, nanti terserah kepada Termohon, kepada Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menjelaskan apa yang didalilkan dalam permohonan itu. Nanti kita akan dengar di sidang berikutnya. Karena ini hari ini adalah giliran

Pemohon, nah kita kasih waktu, itu sudah. Nanti kita dengar lagi waktu di sini, di sini, dan di sini.

Nah, sebelum sidang ini ditutup, ini pertama khusus untuk Perkara 138 itu ditarik. Jadi ... apa namanya ... nanti apakah penarikannya dikabulkan atau tidak, akan dibahas dalam RPH. Itu artinya kewajiban Termohon untuk menjawab dan segala macam itu tidak otomatis gugur, jadi kalau mau menjawab silakan juga kan, kalau mau. Supaya kelihatan ada pekerjaan juga gitu, karena semuanya kan sudah ditandatangani. Ini soal ... apa ... soal penarikan permohonan.

Jadi, di sidang berikutnya, kami tidak akan memanggil lagi untuk Perkara 138 karena sudah ditarik, gitu.

Nah, untuk perkara yang lain, untuk 114, ini kita sahkan ... apa ... ada beberapa catatan. Ini menyerahkan bukti P-1 sampai bukti P-41 ya. Benar, ya? Ini ada beberapa catatan, tapi tidak berkaitan dengan bukti. Buktinya kita sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Kuasa Pemohon atas nama Yanuar P. Wasesa, Paskaria Tombi, dan lain-lain, belum ada tanda tangan di Surat Kuasa, nanti tolong dicek.

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [01:08:25]

Baik, Yang Mulia.

527. KETUA: SALDI ISRA [01:08:26]

Ini yang tidak tanda tangan, jangan-jangan bagiannya lebih kecil dari yang tanda tangan.

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [01:08:29]

Bukan, Yang Mulia.

529. KETUA: SALDI ISRA [01:08:27]

Ya, nanti diselesaikan.

KTA Kuasa Pemohon atas nama Ronny Berty Talapessy dan lain-lain, itu sudah habis masa berlakunya.

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [01:08:43]

Baik, Yang Mulia.

531. KETUA: SALDI ISRA [01:08:44]

Ya, ini perlu juga kami ingatkan karena ini kan kewajiban Saudara-Saudara Advokat kepada organisasi Advokat. KTA Kuasa Pemohon atas nama Elya Daylon Sitanggang tidak ada dan KTA atas nama Jemmy Mokolensang, tidak terbaca.

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [01:09:00]

Baik, Yang Mulia.

533. KETUA: SALDI ISRA [01:09:01]

Nanti tolong diselesaikan.

KTA Kuasa Pihak Terkait atas nama Muhammad Ridho sudah habis masa berlakunya. Ini kalau kita mau agak kejam ini, yang sudah habis-habisin ndak boleh masuk ruang sidang ini.

Jadi itu ya, tolong diperhatikan sebelum masuk ruang sidang berikutnya, itu yang semua masalah tadi sudah bisa diselesaikan.

Yang Malang kita tidak perlu sahkan lagi karena ditarik, sudah dikonfirmasi.

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [01:09:30]

Izin, Yang Mulia. Untuk 114, kita ada mengajukan tadi surat pengunduran diri kuasa.

535. KETUA: SALDI ISRA [01:09:36]

Oke, nanti kami cek.

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [01:09:38]

Atas nama Rudi Zainal Sihombing, Yang Mulia.

537. KETUA: SALDI ISRA [01:09:42]

Oke, nanti kami cek.

Kemudian Perkara 167 Kota Binjai, bukti ... mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-135. Betul? Binjai? Binjai, betul?

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARKARANDO SIREGAR [01:09:42]

Betul.

539. KETUA: SALDI ISRA [01:09:42]

Ya, tapi ini ada catatan, Bukti P-1 sampai dengan ... mohon maaf, dengan catatan Bukti T-P ... dimatikan di situ. Bukti P-35, Bukti P-55, Bukti P-72, Bukti P-84, P-99, P-127, P-130 tidak terdapat bukti fisiknya.

Selebihnya telah diverifikasi. Jadi nanti tolong dilengkapi ya, yang sudah lengkap disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 183 Kabupaten Pamekasan mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-327. Betul, ya?

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:09:51]

Betul, Yang Mulia.

541. KETUA: SALDI ISRA [01:09:55]

Nah, ini ada catatan. Bukti P-110, video yang terdapat di dalam flashdisk tidak sesuai dengan yang tertera dalam daftar alat bukti, jangan-jangan salah kasih video, video yang apa yang Anda kasih itu.

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:10:07]

Siap, Yang Mulia.

543. KETUA: SALDI ISRA [01:10:10]

Nanti tolong dicek, ya?

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD. KHOLIS [01:10:10]

Dicek lagi, Yang Mulia. Takut salah memasukkan video.

545. KETUA: SALDI ISRA [01:10:13]

Ya, salah memasukkan video nanti berbahaya itu.
Kemudian, Bukti P-122, P-128, P-189, P-190, P-208, P-235, P-271, P-287 tidak berkesesuaian antara bukti fisik dengan daftar alat bukti. Nah, nanti tolong diperbaiki ya, Pak, ya. Nah, yang tidak bermasalah, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [01:10:47]

Izin, Yang Mulia.

547. KETUA: SALDI ISRA [01:10:49]

Ya, sabar. Ini dari mana Pak?

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [01:10:50]

Dari 183.

549. KETUA: SALDI ISRA [01:10:52]

Ya, apa, Pak?

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [01:10:53]

Mohon izin kepada Yang Mulia, kita mengajukan Permohonan untuk Inzage.

551. KETUA: SALDI ISRA [01:10:58]

Ya, nanti akan saya umumkan semua, Pak.

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [01:12:01]

Ya. Terima kasih (...)

553. KETUA: SALDI ISRA [01:12:01]

Ndak usah satu-satu.

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [01:12:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

555. KETUA: SALDI ISRA [01:12:04]

Nah, ini kan terlalu cepat cara berpikirnya, saya mau ngomong itu sudah dipintas, begitu.

Kalau ada yang melakukan permohonan inzage, dipersilakan, dan itu dilakukan pada jam kerja, tidak melebihi pukul 16.00, ya. Kita sudah sediakan di Gedung 1, di lantai dasar tempat mendaftar kemarin itu, ada satu tempat untuk inzage. Nah, nanti boleh datang ke situ. Cukup? Ada yang lain?

Nah, ini pengumuman, diingatkan kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, kalau nanti menjawab atau membantah ya, terutama Termohon, tolong yang dijawab dan dibantah itu dalil Pemohon, supaya nanti bisa kita cross perbedaannya itu. Jadi, jangan lain didalilkan, lain yang dijawab, satu.

Yang kedua. Karena ini semuanya akan berbasis pada bukti, tolong bukti-buktinya itu dilengkapi, tolong bukti-bukti itu dilengkapi. Jadi, enggak perlu perang urat saraf ini, enggak perlu perang opini, sodorkan semua bukti, bukti itu yang akan kami nilai nanti. Karena ini kasus konkret ya, beda dengan pengujian undang-undang, Hakim bisa berimajinasi, bisa baca buku, dan segala macamnya, tanya Pak Gugum itu. Tapi, kalau kasus konkret itu basisnya tetap kepada bukti.

Oleh karena itu, semuanya harus mempersiapkan diri menyerahkan bukti ke Mahkamah dengan baik dan harus berasumsi ya, perkara ini tidak lanjut. Nah, itu asumsinya, supaya di kesempatan pertama itu optimal menyerahkan bukti. Jangan berpikir, "Sudahlah, nanti kalau di tahap pembuktian lanjutnya saja nanti diserahkan bukti." Kalau ya lanjut, kalau tidak? Oleh karena itu, soal bukti ini menjadi penting, diingatkan kepada semua kita.

Dan yang ketiga, serahkan bukti itu kalau sebaiknya menjelang persidangan, supaya kami memiliki waktu untuk memverifikasi. Karena ini kan akan ada satu kali sidang lagi nih, mendengarkan Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu. Kalau di ujung persidangan berikutnya baru diserahkan bukti dan buktinya itu tiga truk, nah enggak bisa kita verifikasi itu. Oke, ya? Jadi, kami diberi juga waktu untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Itu saja cukup?

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [01:12:51]

Ada yang (...)

557. KETUA: SALDI ISRA [01:12:51]

Ada yang (...)

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [01:12:52]

Izin, izin, Yang Mulia.

559. KETUA: SALDI ISRA [01:12:53]

Sabar.

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [01:12:54]

183.

561. KETUA: SALDI ISRA [01:12:55]

Apa lagi, Pak? Bapak mentang-mentang dekat Prinsipal, aktif sekali ini.

562. TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [01:13:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

Menindaklanjuti tadi permohonan itu apakah melalui tertulis ataukah cukup yang disampaikan oleh Yang Mulia? Terima kasih, Yang Mulia.

563. KETUA: SALDI ISRA [01:13:10]

Permohonan yang nanti Bapak (...)

564. TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [01:13:12]

Permohonan inzage.

565. KETUA: SALDI ISRA [01:13:13]

Nanti, Bapak sampaikan tertulis, ketemu dengan mereka, ya.

566. TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [01:13:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

567. KETUA: SALDI ISRA [01:13:17]

Ya.

568. KUASA HUKUM PIHAK PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAKTI RIZA HIDAYAT [01:13:18]

Izin, Yang Mulia.

569. KETUA: SALDI ISRA [01:13:19]

Mana lagi ini?

570. KUASA HUKUM PIHAK PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAKTI RIZA HIDAYAT [01:13:20]

Di sini, Pak.

571. KETUA: SALDI ISRA [01:13:21]

Ya.

572. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMES SIMANJUNTAK [01:13:25]

Kami dari Kuasa Hukum Termohon dalam Perkara 114 mau menyerahkan Surat Kuasa.

573. KETUA: SALDI ISRA [01:13:27]

Oke, nanti diserahkan, Pak, ya.

574. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMES SIMANJUNTAK [01:13:28]

Terima kasih.

575. KETUA: SALDI ISRA [01:13:29]

Ada lagi? Ya.

576. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAKTI RIZA HIDAYAT [01:13:33]

Pihak Terkait 138.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:13:34]

Oke, 138.

578. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 138/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAKTI RIZA HIDAYAT [01:13:35]

Menyampaikan terima kasih dan izin tidak bertemu lagi di Sidang Yang Mulia ini. Terima kasih, Yang Mulia.

579. KETUA: SALDI ISRA [01:13:40]

Oh, saya kira keberatan dengan penarikan permohonan itu.

Ada lagi? Cukup? Kalau tidak, terima kasih. Kita semua sudah membantu suasana berlangsung dengan santai, ringan, dan tidak ada ketegangan karena ini menjadi modal kita sih untuk mencari kebe ... diajukan ke Mahkamah.

Dan kita ingatkan, jangan pernah percaya dengan omongan yang macam-macam. Nah, kita ingatkan, ya, kok bisa begini, bisa begini, dan segala macamnya itu. Sekarang bertarungnya di ruang sidang, jangan menggunakan cara-cara yang jaman jahiliyah itu, untuk memenangkan perkara.

Ini harus diingatkan ini, ya. Karena apa? Salah satu kewajiban para advokat, para pihak yang berperkara di pengadilan, menjaga marwah institusi peradilan, itu penting. Karena apa? Nanti dikarang-karang saja, Pak, ini ada orang dari MK begini, padahal enggak ada sama sekali. Untuk mengambil saja, menarik dari ... apa ... prinsipal,

seolah-olah dari MK dan segala macam. Ini perlu diingatkan. Karena apa? Kita akan sangat keras dengan soal-soal yang begini dan kita berharap tidak ada yang menciderai kondisi normal untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Kita semua, lembaga-lembaga sekarang sedang berupaya memperbaiki diri, jangan dirusak untuk soal-soal yang seperti ini. Ini perlu kami ingatkan dalam sidang ini. Terima kasih.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 114, 138, 167, 183 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 20.19 WIB

Jakarta, 8 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

